

RESPONS LOKAL TERHADAP REVOLUSI INDONESIA DI SUNDA KECIL, 1945 – 1950

A.A. Bagus Wirawan*

ABSTRACT

Many studies about national revolution or freedom war more likely show their view based on the "national" perspective. But recently, It seems to be necessary to see from the local perspective. Only based on the local perspective which elevates the response of local dynamic, the understanding of the National Revolution will be better and having much more complete illustration. The local dynamic can be a reflection of the main territory command, which has autonomous characteristic, and the local events represent the authentic reflection of internal dynamic, although the fluctuation is influenced by outsider. In other words, the events of local dynamics such as the response of the local people to revolution taking place in Sunda Kecil are very relevant to explain the National Revolution which was indicated by the beginning process of forming nation identity toward the modern Republic of Indonesia.

Keywords : revolusi Indonesia, respons lokal, perubahan sosial, konflik internal

PENGANTAR

Banyak pembahasan yang dilakukan, baik berupa buku-buku, artikel yang diterbitkan, maupun yang diseminarkan, tentang Revolusi Nasional atau Perang Kemerdekaan. Mereka—sejarawan atau pembicara lebih menonjolkan pandangannya dari perspektif "nasional" atau elite nasional di pusat: Jakarta-Yogyakarta--Bukittinggi. Pandangan dari perspektif "nasional" memperlakukan fenomena dan dinamika lokal hanya sebagai ilustrasi dari fenomena revolusi di pusat. Oleh karena itu, Sejarah Revolusi Nasional berporos pada jaringan Jakarta-Yogyakarta-Bukittinggi. Akan tetapi, kecenderungan studi sejarah sepuluh tahun terakhir terjadi sebaliknya. Fenomena peristiwa yang diangkat dan diteliti dipandang dari perspektif "lokal".¹

Setelah Perang Dunia II, Belanda datang kembali ke Indonesia untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang yang kalah

dalam peperangan itu. Pihak Belanda tidak mau memperhatikan perubahan-perubahan yang telah terjadi di Indonesia. Rakyat Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Sejak itu telah terjadi perubahan di Indonesia yaitu lahirnya negara bangsa yang kemudian disebut Republik Indonesia sederajat dengan negara-negara bangsa lainnya di dunia.

Dinamika lokal, khususnya di Provinsi Sunda Kecil sebagai respons terhadap Revolusi Nasional ternyata menunjukkan sosok dan dukungannya yang sangat dipengaruhi oleh proses dialektik antara perang dan diplomasi pada dua peristiwa yang terjadi, yaitu Puputan Margarana (pada tanggal 20 November 1946: perang mempertahankan kemerdekaan) dan Konferensi Denpasar (pada tanggal 17-24 Desember 1946: diplomasi antar NIT dan RI). Kedua peristiwa pada tahun yang sama itu (1946) telah terjadi di

* Staf Pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, UNUD, Denpasar, Bali

Bali sebagai tempat ibu kota Provinsi Sunda Kecil. Respons lokal berikutnya (1946-1950) ditandai oleh konflik antara 'non' dan 'ko' yang sama-sama memperoleh dukungan dalam masyarakat. Ancaman terhadap Republik Kesatuan (RI) telah melahirkan golongan 'non' (golongan Republikan unitaris) yang sangat menentang Republik Serikat (RIS federalis) yang mendapat dukungan dari golongan 'ko' (golongan federalis).

Dapat dikatakan bahwa dinamika lokal yang muncul sangat relevan untuk menjelaskan respons Revolusi Nasional yang merupakan proses awal pembentukan identitas kebangsaan dan pembangunan bangsa bagi negara bangsa yang modern yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali Irian Barat pada tanggal 15 Agustus 1950.

Berdasarkan paparan ringkas fase-fase dinamika lokal selama periode revolusi dan respons masyarakat dapat diangkat tiga masalah. Pertama, seberapa jauh masyarakat lokal Sunda Kecil merespons berita proklamasi dari revolusi Indonesia sebagai kekuatan eksternal dan supra lokal. Masalah kedua, mengapa tidak terjadi revolusi sosial ketika terjadi revolusi Indonesia yang direspons oleh masyarakat di Sunda Kecil. Masalah ketiga, dampak revolusi Indonesia dan respons masyarakatnya terhadap perubahan sosial.

RESPONS MASYARAKAT TEHADAP PROKLAMASI DI SUNDA KECIL

Sebelum rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diakhiri (18-22 Agustus 1945), Presiden Soekarno menunjuk sembilan orang anggota sebagai Panitia Kecil. Panitia kecil diberi tugas untuk menyusun rancangan pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Mereka yang ditunjuk adalah R. Oto Iskandardinata sebagai ketua, dan anggota-anggotanya: Mr. A. Subardjo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusuma, dr. Amir, A.A. Hamidhan, dr. Ratulangie dan Mr. I G.K. Pudja (*Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, 1995:36;343-344).

Terbentuknya Provinsi Sunda Kecil pada tanggal 19 Agustus 1945 merupakan salah satu hasil keputusan Panitia Kecil. Bersamaan dengan terbentuknya tujuh provinsi lainnya sebagai bagian wilayah negara Republik Indonesia (RI) Proklamasi. Ketujuh provinsi lainnya yang dibentuk pada waktu itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Selebes, dan Maluku. (*Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, 1995:463-464).

Presiden RI, Soekarno mengangkat dan menetapkan Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai Gubernur Sunda Kecil pada tanggal 22 Agustus 1945, setelah PPKI dibubarkan pada sidangnya yang terakhir. Gubernur Pudja diberi kuasa oleh Ir. Soekarno, Presiden RI, untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Diangkat pula pada waktu yang bersamaan empat gubernur lainnya, yaitu Mr. Teukoe Hasan untuk Provinsi Sumatera, Ir. Pangeran Moh. Noor untuk Provinsi Borneo, dr. G.S.S.J.Ratu Langie untuk Provinsi Selebes, dan Mr. J. Latuharhari, untuk Provinsi Maluku (*Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, 1995:463-464).

Setelah ditetapkan dan diangkat sebagai "Gubernur Sunda Kecil, Mr. I G.K. Pudja kembali ke Bali pada tanggal 23 Agustus 1945. Kedatangannya membawa mandat yang berisi dua hal penting yaitu (1) membawa kepastiaan berita Proklamasi Kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta; dan (2) mengangkat I.B. Putra Manuaba sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID atau KND) untuk Provinsi Sunda Kecil (Pendit, 1979:69).

Sebagai Gubernur Provinsi Sunda Kecil, dia mulai membentuk pemerintahan yang dinamakan Pemerintahan Nasional RI, disingkat Pemerintahan Sunda Kecil. Untuk menjalankan tugasnya sehari-hari, gubernur membentuk Badan Pekerja yang anggotanya adalah dr. Moh. Angsar, I Goesti Bagoes Oka, dan I.B. Putra Manuaba. Pusat pemerintahan dan ibu kota Provinsi Sunda Kecil ialah Singaraja. Pemerintah nasional RI yang baru terbentuk, pada kenyataannya menghadapi dua kekuasaan pemerintah,

yaitu pemerintah pendudukan Jepang (*Minseibu*) Sunda Kecil dan pemerintah swapraja oleh raja-raja yang tetap eksis selama pendudukan Jepang (Umar, 1986:39-41).

Penyebaran berita proklamasi menjadi tugas berat para birokrat RI di daerah. Respons sangat antusias muncul dari kalangan pemuda terutama di dua kota yaitu Singaraja dan Denpasar. Mereka mengorganisasikan diri dalam organisasi-organisasi pemuda. Angkatan Muda Indonesia (AMI) didirikan pada tanggal 31 Agustus 1945 di Denpasar di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Sindhu, dan di Singaraja di bawah pimpinan Tjokorda Sudarsana. AMI di Denpasar kemudian diubah namanya menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI). Demikian pula AMI di Singaraja, diubah namanya menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) pada waktu dipimpin oleh Gede Puger (Pendit, 1979:70-71).

PRI dan PESINDO secara tegas bertekad mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI. Kedua Organisasi pemuda yang baru dibentuk ini sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat. Selain itu, para pelajar yang tergabung dalam organisasi Ikatan Siswa Sekolah Menengah (ISSM) di kota Denpasar ikut mendukung usaha-usaha PRI untuk menyebarkan berita Proklamasi di seluruh Bali. Mereka ikut pula menyebarkan berita proklamasi ke daerah-daerah lainnya di wilayah Provinsi Sunda Kecil. Berita proklamasi sampai di daerah Lombok pada tanggal 15 Oktober 1945, Sumbawa pada tanggal 31 Oktober 1945 dan Sumba pada awal tahun 1946². Berkat upaya seorang pemuda Republikan Jawa, Soekardani, bendera Merah Putih dikibarkan di kota-kota yang dilalui di Bali dan Lombok pada September- Oktober 1945.³

Selain organisasi pemuda dan pelajar yang terbentuk, dibentuk pula badan perjuangan yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR) untuk mengawal pemerintahan sipil. BKR yang dibentuk secara bersamaan pada tanggal 31 Agustus 1945 di dua kota: Singaraja di bawah pimpinan I Made Putu, seorang mantan Daidanco dan di Denpasar di bawah pimpinan Nyoman Pegeg

adalah bukti kesungguhan sikap Gubernur Mr. Pudja untuk mewujudkan sistem pemerintahan RI di daerah (Pendit, 1979:73).

Tindakan politik Gubernur Mr. Pudja untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Cookan, kepala pemerintahan pendudukan Jepang Sunda Kecil (*Minseibu*) di Singaraja dilakukan dengan mengajukan empat tuntutan: (1) mengganti bendera Nippon dengan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di kantor pusat pemerinthan Sunda Kecil; (2) menghapus waktu Nippon dan menggantinya dengan memakai waktu Indonesia; (3) mencabut jam malam dan memberlakukan suasana darnai yang meliputi kemerdekaan; dan (4) pemerintahan Sunda Kecil harus diisi oleh tenaga-tenaga bangsa Indonesia sendiri serta menonaktifkan pemimpin-pemimpin Jepang. Tuntutan yang diajukan pada akhir September 1945 ditolak oleh Cookan (Pendit, 1979:77-78).

Gubernur Mr. Pudja bersama-sama dengan Ketua KND I.B. Putra Manuaba mengadakan perjalanan keliling Pulau Bali. Mereka selama perjalanan, menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi kepada rakyat. Atas desakan para pemuda yang terorganisasikan dalam PRI, Pesindo, ISSM dan BKR, Gubernur Mr. Pudja bersama-sama Kepala-kepala Jawatan sepakat untuk mengajukan ultimatum kepada pembesar tertinggi pemerintahan pendudukan Jepang, Cookan, agar segera menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Gubernur Sunda Kecil. Ultimatum yang diajukan dikabulkan oleh Cookan pada tanggal 8 Oktober 1945 (Pendit, 1979:77-78). Beberapa hari setelah penyerahan kekuasaan, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi insiden bendera di pelabuhan Buleleng. Bendera Belanda yang dikibarkan di depan kantor bea cukai digantikan dengan bendera Merah Putih oleh pemuda pejuang. Dari atas kapal mereka menembaki. Pada peristiwa itu I Ketut Merta tewas akibat tembakan awak kapal Belanda (Pendit, 1979:77-78). Tewasnya I Ketut Merta menjadi awal respons dengan cara kekerasan perang dari pemuda pejuang selanjutnya.

PUPUTAN MARGARANA SEBAGAI RESPONS PERANG DALAM REVOLUSI INDONESIA

Perubahan nama dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 1 November 1945, bertujuan untuk merealisasikan keputusan Panitia Kecil KNIP pada rapat tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta yaitu pembentukan tentara kebangsaan. I Gusti Ngurah Rai diangkat sebagai komandan TKR berpangkat Letnan Kolonel untuk wilayah komando sentral Sunda Kecil (Pendit, 1979:74). Dia memegang pimpinan kunci perjuangan perang sejak dilantik sampai 20 November 1946.

Tentara Serikat mendarat di pelabuhan Benoa pada tanggal 18 Pebruari 1946. Mereka datang untuk melaksanakan tugas-tugas, memindahkan tawanan perang dan kaum interniran Serikat, melucuti militer Jepang, dan memulihkan keamanan. Kehadiran mereka disambut baik oleh aparat pemerintahan RI Sunda Kecil. Mereka diberi penjelasan bahwa di Provinsi Sunda Kecil telah berjalan pemerintahan RI yang dipimpin oleh Gubernur Mr. Pudja (Pendit, 1979:137-138).

Suasana berubah ketika awak kapal "Gajah Merah" yang terdiri dari personal pemerintahan sipil Hindia Belanda (NICA) di bawah pimpinan Letkol. Inf F.H. ter Meulen datang dan mendarat pada tanggal 2 Maret 1946. Mereka menyatakan diri sebagai pengganti kedudukan tentara Serikat untuk melaksanakan tugas-tugas tentara Serikat sebelumnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya, yang terjadi sebaliknya yaitu mereka berturut-turut menduduki kota-kota: Denpasar pada tanggal 2 Maret, Gianyar 3 Maret, Singaraja 5 Maret, Tabanan 7 Maret dan Negara pada tanggal 19 Maret 1946. Selain menduduki kota-kota, mereka juga menangkap para pemimpin RI: Gubernur, Ketua KND dan kepala-kepala jawatan. Para pemimpin RI yang ditangkap itu dibawa dan ditahan di Penjara Pekambingan, Denpasar (Pendit, 1979:144).

Suasana semakin tegang karena sejak kehadiran NICA, situasi konflik yang berke-

panjang terjadi antara golongan pendukung RI Proklamasi dengan golongan pendukung kembalinya penjajahan Belanda (NICA). Kekuasaan pemerintahan sipil RI Provinsi Sunda Kecil diambil alih oleh NICA yang sudah terlebih dahulu mendekati raja-raja Bali yang mau diajak bekerjasama. Beberapa di antaranya membentuk milisi laskar-laskar kerajaan yang diberi nama Pemuda Pembela Negara (PPN) di kerajaan Gianyar, Badan Keamanan Negara (BKN) di kerajaan Klungkung dan Anti Indonesia Merdeka (AIM) di kerajaan Karangasem. Di Jembrana didirikan Badan Pemberantas Pengacau (BPP) ternyata aktivitasnya memang dipersiapkan sebagai milisi antirepublik⁴.

Pihak Belanda (NICA) tidak mengakui pemerintahan Provinsi Sunda Kecil dan menggantikannya dengan pemerintahan Keresidenan Bali Lombok seperti tata pemerintahan pada sebelum perang (PD II). Gubernur Mr. Pudja ditahan, digantikan oleh Residen Dr. M.Boon (1946-1949) yang memperoleh dukungan Dewan Raja-raja di Bali. ⁵Akan tetapi, di kalangan pemuda pejuang yang terorganisir dalam badan-badan perjuangan sangat menentang kembalinya Belanda (NICA). Mereka tetap mendukung dan mempertahankan RI Proklamasi dengan cara revolusioner. Mereka berjuang dengan mengangkat senjata dan berjanji bertempur terus sampai cita-citanya tercapai (Pendit, 1979:199).

Badan-badan perjuangan yang telah ada, yaitu TKR Sunda Kecil, PRI, dan Pesindo menggalang kekuatan dan berfusi dalam satu badan perjuangan pada tanggal 14 April 1946. Gabungan ini diberi nama Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil (MBU DPRI Sunda Kecil) di bawah pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Beberapa desa atau kawasan tertentu menjadi ajang medan pertempuran antara badan perjuangan Republik dengan tentara NICA. Operasi Lintas Laut di Selat Bali pada tanggal 3 April 1946, penyerangan Pos NICA di Penebel 15 April 1946, Pertempuran Kalanganyar 26 April 1946, Pertempuran Munduk Malang 11 Mei 1946, Pertempuran Sawah Tabanan 11 Mei 1946, Long

March Gunung Agung Juni-Juli 1946, Pertempuran Tanah Aron 9 Juli 1946, dan lain-lainnya adalah bukti respons kekerasan perang untuk mempertahankan nilai-nilai revolusi (Rai, 1985:61-93).

Puncak pertempuran terbuka terjadi di desa Marga, Tabanan. Pertempuran yang terjadi pada tanggal 20 Nopember 1946 oleh orang-orang Bali disebut Puputan Margarana. Pada peristiwa itu, Letkol Rai dan pucuk pimpinan pasukan inti lainnya: Mayor Debes, Mayor Wisnu, Mayor Sugianyar dan Wagimin tewas tertembak pasukan NICA. Demikian pula anggota pasukan inti yang disebut pasukan Ciung Wanara tewas dalam perang Puputan itu. Seluruhnya berjumlah 96 orang (Pendit, 1979:214-222; Nasution, 1978:117-122). Kekuasaan raja yang berkoalisi dengan kekuatan eksternal NICA semakin memperkokoh kekuasaan status quo. Setiap perlawanan dapat dipatahkan dan tidak memberi peluang terjadinya revolusi sosial untuk menggulingkan kekuasaan raja-raja yang dikawal militer NICA.

KONFERENSI DENPASAR DAN PROSES DIPLOMASI DALAM REVOLUSI INDONESIA

Pemerintah Keresidenan Bali Lombok (NICA) berusaha menormalisasikan keadaan, memulihkan keamanan dan ketertiban dengan menumpas sisa-sisa gerakan pemuda gerilya yang mereka sebut sebagai golongan ekstremis, pemberontak, perampok, pembunuh, dan lain-lain. Sementara itu, Gubernur Jenderal H.J. van Mook, pemrakarsa dan konseptor dari konferensi yang diselenggarakan di Denpasar untuk mewujudkan cita-cita federalisme bagi negara Indonesia di bawah naungan Ratu Belanda. Penyelenggaraan Konferensi Denpasar di Bali Hotel direncanakan pada tanggal 7-24 Desember 1946. Akan tetapi, secara resmi dibuka oleh Letnan Gubernur Jenderal van Mook baru pada tanggal 18 Desember 1946⁶. Dalam pidato pembukaannya, dinyatakan bahwa Pemerintah Belanda senantiasa berusaha secara yuridis atau menurut hukum, mengajak semua bagian

di wilayah Indonesia untuk mempertahankan karakternya masing-masing dalam suatu negara dengan bentuk ketatanegaraan federal. Negara federal menurut pendapatnya, sangat cocok diterapkan untuk memelihara kesatuan nasional. Kepentingan masing-masing bagian dan daerah berhak mengatur diri sendiri dalam lingkungan kehidupan masyarakat sendiri dan di bawah Ratu Belanda.⁷ Ditekankan pula bahwa pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) berbeda dengan di Jawa dan Sumatra karena wilayah Indonesia Timur diklaim sebagai daerah pendudukan Sekutu atau NICA Belanda.

Oleh karena Indonesia tidak mungkin dijajah kembali seperti sebelum PD II, Pemerintah Hindia Belanda sesudah Perang di bawah Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan memelopori pembentukan Negara Indonesia Serikat yang federalistik (The Liang Gie, 1967:142-143). Salah satu negara bagian yang pertama dibentuknya ialah NIT yang meliputi wilayah Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku sebagai persiapan mewujudkan cita-cita federalnya.

Menurut Peraturan Pembentukan NIT, NIT terdiri atas 13 daerah otonom. Menurut penjelasan yang diberikan oleh Kementerian Penerangan NIT, susunan organisasi ke 13 daerah itu dapat dibedakan dalam dua bentuk utama, yaitu (1) prinsip Bali: sebuah pemerintah federasi (*bestuwend-college*) swapraja landskap dan (2) prinsip Lombok, dengan *bestuwend raad* merupakan sebuah *neo-landschap* (The Liang Gie, 1967:142-143).

Prinsip Bali merupakan federasi 8 swapraja *landschappen*: Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Susunan pemerintahannya memakai prinsip Bali, yaitu terdiri dari sebuah Dewan Raja-raja dan sebuah Dewan Perwakilan yang disebut Paruman Agung. Kekuasaan membuat peraturan daerah dan menetapkan anggaran keuangan dilakukan oleh kedua badan ini. Daerah-daerah yang menganut prinsip Bali terdiri atas 10 daerah otonom: Bali, Flores, Sumba, Sumbawa, Timor, dan pulau-pulauanya,

Sangihe dan Talaud, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Prinsip Lombok merupakan sebuah *neolanschap*. *Neo-landschap* Lombok menjadi satu daerah dalam lingkungan NIT. Susunan pemerintahannya terdiri atas sebuah Dewan Lombok dan sebuah Badan Pemerintahan Harian. Dewan Lombok dan Badan Pemerintahan Harian itu diketuai oleh Kepala Daerah. Daerah-daerah yang menganut prinsip Lombok terdiri atas 3 daerah otonom: Lombok, Minahasa, dan Maluku Selatan (The Liang Gie, 1967:144-146).

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, Letnan Gubernur Jenderal van Mook sesudah perang, terhadap swapraja-swapraja (*zelfbesturende landschappen*) ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, kerjasama antara swapraja, dan otonomi yang lebih besar. Keragaman pemerintahan di daerah, baik prinsip Bali maupun prinsip Lombok dengan segala variasinya dibiarkan terus berjalan (The Liang Gie, 1967:149-150). Meskipun demikian, antara penataan pemerintah daerah di Jawa dan Sumatra, terutama di wilayah RI dan di Hindia Belanda NIT, terjadi persamaan dalam mengadakan perubahan ke arah demokratisasi dan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah-daerah (The Liang Gie, 1967:149-150).

Upaya-upaya Pemerintah Hindia Belanda secara bertahap diikuti dengan penyerahan pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Raja-raja di daerah Bali pada tanggal 14 Maret 1949⁸, kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Daerah-daerah dalam wilayah NIT dikelompokkan menjadi tiga Komisariat Negara sebagai pengganti keresidenan, pada tanggal 1 Oktober 1949 (The Liang Gie, 1967:147). Ketiga Komisariat Negara tersebut ialah (1) Komisariat Negara Selatan yang melingkupi daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor; (2) Komisariat Negara Tengah yang melingkupi daerah Sulawesi Selatan dan Maluku Selatan; dan (3) Komisariat Negara Utara yang melingkupi daerah Minahasa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sangihe & Talaud, dan Maluku Utara.

Suatu macam daerah otonom baru dalam lingkungan NIT ialah "Daerah". Ini merupakan satuan-satuan kenegaraan yang modern dan diharapkan cukup kokoh untuk bersama-sama menjadi tiang-tiang penegak NIT. Sebagian besar daerah-daerah ini merupakan federasi di antara *selfbesturende landschappen* seperti Dewan Raja-raja di Daerah Bali (The Liang Gie, 1967: 147-149).

Melalui NIT, muncul seorang tokoh diplomat yaitu Ide A.A. Gde Agung, penggagas model federal Indonesia yang berbeda dengan model federal van Mook perdana menteri yang merangkap menteri urusan dalam negeri Pemerintah NIT. Sejak menjadi Perdana Menteri NIT pada tanggal 12 Januari 1949, kemampuan diplomasinya ditunjukkan pada perundingan-perundingan dengan wakil-wakil pemerintah RI, pemerintah Belanda, dan pemerintah negara-negara bagian dan daerah-daerah. Atas prakarsanya, dibentuk sebuah lembaga sebagai wadah bermusyawarah negara-negara dan daerah-daerah bagian yang disebut Pertemuan Musyawarah Federal yang lebih dikenal dengan BFO, singkatan dari *Bijeenkomst voor Federale Overleg*, pada tanggal 15 Juli 1948 (Leirissa, 2006:120-121). BFO dan Ide A.A. Gde Agung aktif berperan dalam perundingan "sesama bangsa Indonesia" terutama Syahrir-Hatta (RI) untuk berdiplomasi mewujudkan gagasan federal Indonesianya dengan Belanda. BFO memprakarsai perundingan-perundingan internal ketika dilangsungkannya Konferensi Antar Indonesia (KAI), baik di Yogyakarta maupun di Jakarta pada bulan Juli-Agustus 1949. (Leirissa, 2006:270-284). Dalam konferensi itu hadir wakil-wakil pemerintah RI dan negara-negara bagian dan daerah-daerah. Mereka bermusyawarah untuk mengadakan persiapan-persiapan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag yang dimulai pada bulan Agustus 1949. Puncak perundingan diplomasi pada KMB telah memutuskan bahwa penyerahan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada RIS dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 (Agung, 1985:856-857). Momentum ini dapat dikatakan keunggulan dan

kemenangan penganut asas federalisme model federal Indonesia Ide A.A.Gde Agung (NIT, BFO) dan Syahrir-Hatta (RI) dan kekalahan model federalis van Mook dan penggantinya.

RESPONS GOLONGAN NON DAN KO DALAM REVOLUSI INDONESIA

Berdasarkan gambaran fenomena pada dua peristiwa di atas dapat dikatakan bahwa respons lokal terhadap Revolusi Nasional Indonesia adalah dinamika dalam proses politik dan sosial. Dinamika yang terjadi merupakan interaksi antara faktor-faktor internal dan eksternal. Keduanya terjalin erat dalam suatu proses dialektik secara terus menerus selama \pm 5 tahun: dari Proklamasi Kemerdekaan sampai KMB. Memang benar bahwa jalannya Revolusi Indonesia sangat ditentukan oleh dua kekuatan yang tarik-menarik antara perang dan diplomasi (Kartodirdjo, 1981:4) yang mempengaruhi dinamika intern di Sunda Kecil.

Pada skala mikro, realitas respons dinamika intern yang terjadi berupa konflik antara dua golongan sebagai pendukung kekuatan perang dan diplomasi, yaitu golongan yang bersikap “non” dengan yang bersikap “ko”. Konflik kedua golongan itu telah menjadi gejala umum sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Konflik “non” dan “ko” juga disebut pertentangan antara pendukung “republik” (RI Proklamasi unitaris) dan “federalis” (RI Serikat) atau antara “patriot” dan “penyebang” (Tirtiprodjo, 1966:6-17). Golongan “non” didukung oleh pemuda pejuang pro republik (RI Proklamasi unitaris), sedangkan golongan “ko” memperoleh dukungan Dewan Raja-raja yang pro federal (NIT Serikat). Konflik antara “non” dan “ko” yang berkepanjangan telah mewarnai respons perjuangan Revolusi Indonesia di Sunda Kecil.

Selama periode Revolusi Indonesia di Sunda Kecil, kekuasaan pemerintahan daerah dipegang oleh Dewan Raja-raja karena sikapnya yang mau bekerja sama (koperasi) dengan pihak Belanda (NICA) yang membentuk NIT. Sebaliknya, golongan republikain tidak memegang kekuasaan karena daerah-daerah di Sunda Kecil telah

dimasukkan dalam wilayah kekuasaan NIT dan residennya. Para pemimpin pemerintahan sipil ditangkap dan ditahan, demikian pula para komandan militernya. Akan tetapi, sebagian dari mereka pergi ke hutan-hutan, pegunungan melanjutkan perjuangan bergerilya dan sebagian lagi tinggal di rumahnya di kota menghimpun kekuatan di bawah tanah. Mereka bersikap tidak mau bekerja sama (“non”kooperasi) dengan elite birokrasi yang berkuasa (Residen dan Dewan Raja-raja). Meskipun sejak berlakunya ketatanegaraan NIT sudah dibentuk badan perwakilan yang lebih demokratis, yaitu Paruman Agung, kekuasaan residen masih kuat untuk mengemudikan pemerintahan di wilayahnya: Bali, Lombok, dan Timor. Alasan yang digunakan adalah situasi dianggap belum aman dan tertib terutama di Bali. Lebih-lebih gerilya yang dilancarkan oleh pemuda pejuang (DPRI) dicap sebagai kaum ekstremis dan pemberontak (Pendit, 1979:301) sehingga harus ditumpas. Kekuasaan raja dan tindakan represif militer NICA sangat membatasi ruang gerak perlawanan dan menutup sama sekali terjadinya revolusi sosial. Selain itu, kekuatan diplomasi antar negara bangsa: RI dan Belanda dalam persetujuan Renville tahun 1948 ikut mempengaruhi corak respons perjuangan terutama di Bali, sebagai daerah yang paling bergolak di Sunda Kecil (Agung, 1983:66-67; Nasution, 1981:222-223).

Respons perjuangan dengan cara gerilya bersenjata semakin ditinggalkan. Para anggota MBU DPRI memutuskan untuk mengadakan penyerahan umum atau turun gunung melalui “instruksi istimewa” pada tanggal 25 Mei 1948 (Pendit, 1979:318). Akan tetapi, kaum republikain lainnya melanjutkan perjuangan mereka dengan cara gerakan bawah tanah. Para mantan gerilya bergabung dengan pemuda di kota membentuk organisasi rahasia di Singaraja yang dinamakan Gerakan Rakyat Indonesia Merdeka (GERIM) di bawah pimpinan Tjilik, Dewa Nyoman Teges, Nyoman Wirya dan I Gusti Bagus Sugriwa pada bulan Juli 1948 (Pendit, 1979:330-331).

Di Bali Selatan: Badung, Jembrana, Tabanan, dan Bangli, di bawah pimpinan I.B. Tantera.

Tjok Anom Sandat, I.B. Tamu membentuk Markas Besar Istimewa (MBI DPRI) yang mengadakan gerakan di bawah tanah. Organisasi GERIM dan MBI DPRI menggabungkan diri ke dalam organisasi Lanjutan Perjuangan pada tanggal 27 Nopember 1949. Tujuannya ialah melanjutkan perjuangan dengan landasan nilai-nilai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945.

Organisasi Lanjutan Perjuangan diubah namanya menjadi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 4 Januari 1950.⁹ Program-program perjuangannya meliputi ketahanan dan taqwa, politik, ekonomi, menggali dana, dan pertahanan (Tjilik, tth.:12). Akan tetapi, gerakan bawah tanah yang dilancarkan PDRI tidak berlangsung lama sebab di tingkat pusat terjadi persetujuan antara pemimpin RI dengan pemimpin-pemimpin gabungan negara-negara federal. Mereka sepakat untuk mendirikan Negara Indonesia Serikat (NIS) berdasarkan persetujuan Renville, kemudian dinamakan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) setelah penyerahan dan pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan kesepakatan pada Konferensi Meja Bundar (KMB).

Kekuatan diplomasi yang puncaknya terjadi pada KMB di Den Haag mengakibatkan semua kontak bersenjata di daerah-daerah dihentikan. Komisi militer NIT di bawah pimpinan Yusuf mengadakan perundingan dengan I.B. Tantera (alias Pak Poleng) pemimpin PDRI agar perjuangan gerilya bersenjata dihentikan. Hasil perundingan ialah penurunan pemuda pejuang gerilya dari gunung-gunung pada tanggal 15 Januari 1950, kemudian dibentuk Batalyon Arjuna TNI di Bali (Pendit, 1979:344). Akibat lebih jauh dari penurunan pejuang gerilya 15 Januari 1950 ialah terjadinya salah paham di antara para pemimpin PDRI: antara kelompok MBI DPRI dan kelompok GERIM, bahkan menjadi konflik tajam. Lebih-lebih setelah dibentuknya tiga kompi tentara bekas alat-alat kekuasaan Belanda (KNIL) yang diberi nama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) (Pendit, 1979:345).

Untuk menghindari konflik yang makin tajam dalam tubuh PDRI, para pemuda di kota

menyelenggarakan kongres pemuda seluruh Bali di Denpasar pada tanggal 14 sampai dengan 17 April 1950. Kongres menghasilkan mosi yang ditujukan kepada pemerintah NIT agar selekasnya melaksanakan langkah-langkah demokratisasi dalam tubuh pemerintahannya. Kongres juga berhasil mengesahkan terbentuknya organisasi pemuda yang diberi nama Kesatuan Pemuda Nasional Indonesia (KPNI) sebagai pencerminan hasrat bersatu pemuda-pemuda seluruh Bali. Tujuan KPNI menyempurnakan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Formatur yang ditunjuk pada waktu kongres berhasil memilih dan mengesahkan A.A. Bagus Sutedja sebagai Ketua Umum pada tanggal 29 Mei 1950 (Pendit, 1979:346). Kongres mampu meredakan keresahan dan konflik kepemimpinan dalam tubuh ex PDRI. Akan tetapi, konflik laten muncul terus antara golongan "non" (republikein) dan golongan "ko" (federalis).

Konflik "non" dan "ko" semakin tajam dan memuncak. Di sana-sini terjadi pembunuhan dan pembakaran rumah-rumah sebagai tindakan balas dendam. Sikap Mayor Sitanala, Komandan APRIS yang condong memihak raja-raja, aparat NIT dan federalis mempertajam konflik. Pembunuhan terhadap Ida Bagus Gde, seorang Punggawa Blayu (Tabanan) adalah korban akibat konflik ini.¹⁰ Keresahan dan konflik dapat diatasi setelah Mayor Sitanala digantikan oleh Mayor Salim, seorang republikein yang memahami aspirasi para pemimpin di daerah yang bersikap "non" dari golongan republikein. Mereka menuntut perubahan sistem pemerintahan dengan mengubah taktik perjuangannya: dari bergerilya di hutan-hutan kemudian menggunakan saluran organisasi sosial politik di kota.

Para tahanan politik sesudah dibebaskan ikut pula masuk ke dalam perkumpulan, organisasi sosial politik. Muncul kelompok-kelompok kepentingan baru yang bersifat asosiatif guna menyalurkan aspirasi mereka. Selain itu kematangan kondisi teknis politik sejak pra hingga pasca proklamasi kemerdekaan ikut mengubah haluan perjuangannya. Mereka berusaha

menguasai kursi-kursi keanggotaan di lembaga legislatif, Paruman Agung. Dalam sidang-sidang, mereka senantiasa mengajukan ide-ide pembaharuan untuk mengubah sistem pemerintahan yang dipandang sudah tidak sesuai dengan semangat zaman pada waktu itu.

Ketika sidang Paruman Agung yang diseleenggarakan secara mendadak pada tanggal 8 Juni 1950, situasi politik semakin kritis, ditetapkan sebuah peraturan tentang perubahan ketatanegaraan di Bali. Dewan Raja-raja dan Paruman Agung kemudian menetapkan sebuah Peraturan Darurat Daerah Bali untuk mengadakan Badan Pengaksana Sementara.¹¹ Formatur berhasil membentuk Badan Pengaksana yang terdiri dari lima orang, yaitu A.A. Gde Oka (Ketua Dewan Raja-raja) sebagai ketua, I G.P. Merta sebagai anggota memegang bidang politik, I G.G. Subamia sebagai anggota memegang bidang sosial, I Wayan Daging sebagai anggota memegang bidang ekonomi dan I Wayan Bhadra sebagai anggota memegang bidang umum.¹²

Sementara itu, berlakunya “Undang-Undang Pemerintahan Daerah-daerah Indonesia Timur (SIT 1950/44)” yang disusun dengan cara tergesa-gesa menambah keresahan. Situasi konflik antara “non” (Republikein) dengan “ko” (Federalis) semakin meningkat menjadi gerakan-gerakan penggedoran, pembakaran, penculikan dan pembunuhan terhadap bekas kaki tangan NICA. Seorang Cina yang bernama Ing bekas mata-mata Belanda dibunuh.¹³ Oleh karena situasi semakin keruh, Badan Pengaksana segera mengambil tindakan dengan jalan memindahkan pegawai pamong praja dan kepolisian. Tjok. Raka Djoni sebagai kepala polisi dipindahkan ke luar Bali.

Menteri Dalam Negeri NIT, Lanto Daeng Pasewang, datang ke Bali pada tanggal 11 Juli 1950. Kedatangannya membawa perubahan, yaitu (1) Badan Pengaksana dapat dianggap sebagai Dewan Pemerintah Daerah Bali dan (2) Dewan Raja-raja di Bali bertindak sebagai badan penasihat.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Bali 7 Agustus 1945 No.

J.18/1/61 dibentuk Panitia Penyelenggara UU 15 Juni 1950/44. Panitia Penyelenggara beranggotakan wakil-wakil dari partai-partai politik yang ada di Bali. Tuntutan panitia yang terpenting pada waktu itu ialah membubarkan Paruman Agung dan segera membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali agar keinginan massa rakyat dapat dipenuhi.¹⁴

Peralihan ketatanegaraan yang terjadi di tingkat pusat mempercepat perubahan-perubahan ketatanegaraan di daerah. Presiden Soekarno memproklamasikan terbentuknya Negara Kesatuan RI di hadapan sidang DPRS dan Senat di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950. Maka, pada saat itu pula NIT sudah dianggap bubar. Keesokan harinya Perdana Menteri Ir. J. Poetoe-hena dan seluruh kabinetnya di Makasar meletakkan jabatan. Sejak itu bekas wilayah NIT terbagi menjadi tiga provinsi, yaitu (1) Provinsi Sunda Kecil di bawah pimpinan Residen I Goesti Bagoes Oka, (2) Provinsi Sulawesi di bawah pimpinan Residen B.W. Lapian, dan (3) Provinsi Maluku di bawah pimpinan Administrator P.T. Mantouw. Dengan demikian riwayat NIT berakhir setelah berusia empat tahun (Agung, 1983:771-773).

Perubahan ketatanegaraan di daerah Bali ditandai dengan dibubarkannya Paruman Agung berdasarkan SK DPD Bali tanggal 20 September 1950 No.7/Darurat. Lima hari setelah pembubarannya, dilantiklah DPRD Bali pada tanggal 25 September 1950. Berdasarkan peraturan tata tertib pemilihan ketua dan wakil ketua dewan telah dipilih I G.P. Merta (Ketua) dan Ida Bagus Oka (Wakil Ketua). Jumlah anggota DPRD Bali termasuk ketua dan wakil ketuanya ialah 41 orang. Mereka adalah wakil-wakil dari organisasi-organisasi sosial dan partai-partai politik: PNI, Masyumi, KPNI, Ikatan Rakyat Murba Indonesia (IRMI), Gabungan Buruh Indonesia (GBI), Persatuan Wanita Indonesia (PWI), Golongan Tani, Orang-orang yang tidak terikat oleh organisasi dan partai.¹⁵

Pada sidang DPRD Bali tanggal 26 September 1950 diputuskan pemilihan dan pengajuan calon Kepala Daerah Bali. Hasilnya dua calon adalah A.A. Bagus Sutedja dan Tjokorda Anom

Putra. Keduanya diajukan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Presiden Soekarno mengangkat secara resmi A.A. Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali.¹⁶ Daerah Bali adalah salah satu daerah administratif Provinsi Sunda Kecil. Daerah-daerah lainnya tetap seperti semula dan tidak dibentuk daerah-daerah baru, sampai tahun 1958 (The Liang Gie, 1967:49). Sejak itu, Provinsi Sunda Kecil yang pada tahun 1954 telah diubah namanya menjadi Provinsi Nusa Tenggara dimekarkan menjadi tiga daerah tingkat I (Dati I) provinsi, yakni Dari I Bali terdiri dari 8 Dati II, Dati I Nusa Tenggara Barat terbagi atas enam Dati II di daerah-daerah Lombok dan Sumbawa, dan Dati I Nusa Tenggara Timur terbagi atas 12 Dati II di daerah-daerah: Sumba, Flores, Timor dan Pulau-pulaunya.

Pemekaran wilayah ini didasarkan atas keragaman sosio kultural berlaku sejak diundangkannya Undang Undang No. 69 Tahun 1958 yang dimasukkan ke dalam Lembaran Negara RI No. 122 Tahun 1958.¹⁷

Dapat dikatakan bahwa sejak akhir periode revolusi, respons lokal ditandai dengan tampilnya golongan "non" (Republikein) sebagai pemegang kekuasaan di daerah. Berarti pula telah terjadi peralihan kekuasaan dari kaum elite tradisional (Dewan Raja-raja) ke tangan kaum elite modern yang berpendidikan (para pemuda pejuang) secara demokratis kompromis.

Pemerintah baru di daerah menetapkan peraturan-peraturan yang mendorong terjadinya perubahan sosial pada aspek ekonomi sosial dan budaya. Perubahan sosial yang terjadi disertai konflik internal antara kelompok-kelompok interes yang muncul sejak revolusi berlanjut pada periode-periode pasca revolusi.

SIMPULAN

Tersebar nya berita proklamasi di Sunda Kecil telah membawa serta nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia: kemerdekaan, demokrasi, kebangsaan, negara modern. Nilai-nilai revolusi Indonesia dan proklamasi yang masuk itu mendapat respons lokal serta mendorong terjadinya perubahan-perubahan. Munculnya

golongan elite modern, yaitu pemuda terpelajar di Provinsi Sunda Kecil yang terorganisasi dalam badan-badan perjuangan, organisasi pelajar, dan organisasi-organisasi sosial politik lainnya sebagai fenomena sejarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka kemudian menamakan diri sebagai golongan Republikein yang dengan gigih mendukung kekuasaan RI Proklamasi unitaris. Mereka juga yang men-cetuskan dimulainya Revolusi Nasional di Sunda Kecil, yang berawal di dua kota, yaitu Singaraja dan Denpasar, Bali. Golongan Republikein sangat penting peranannya dalam menyebarkan ide-ide pembaharuan tentang nasionalisme, demokrasi dan kemerdekaan sampai ke lapisan masyarakat desa. Sebutan "pelopor", "bapak" atau "bung" di kalangan pemuda pejuang memperlemah ikatan-ikatan tradisional terutama struktur kasta. Kehadiran golongan Republikein menimbulkan konflik berkepanjangan antara mereka yang ingin bersatu dengan pemerintah RI Proklamasi dengan mereka yang tetap bergabung dengan pemerintah NIT atau golongan yang mendukung cita-cita federal ciptaan Belanda yaitu RIS.

Polarisasi yang disertai konflik antargolongan selama revolusi di Sunda Kecil juga dikenal dengan sebutan konflik antara "non" dan "ko", "Republikein unitaris" dan "Federalis"; secara bersenjata (perang) dan perundingan (diplomasi). Cara-cara dan dukungan yang dilakukan adalah dinamika intern yang dipengaruhi juga oleh faktor-faktor ekstern baik nasional maupun internasional. Proses dialektik antara perang dan diplomasi yang memperoleh dukungan respons lokal selama periode revolusi tampak dari dua peristiwa, yaitu Margarana dan Konfrensi Denpasar.

Respons lokal ternyata berdampak terhadap perubahan sosial yang disertai konflik selama periode revolusi di Sunda Kecil. Kemenangan pihak kaum Republikein ditandai dengan hapusnya kekuasaan tradisional kolonial Dewan Raja-raja dan Paruman Agung di Bali, kemudian digantikan oleh aparatus republik modern nasionalistik, yaitu Gubernur, Kepala Daerah, Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Daerah yang terintegrasi ke dalam wadah NKRI. Fenomena perubahan yang terjadi lebih menunjukkan sifat-sifat demokratis nasionalistik tanpa terjadinya revolusi sosial. Kemenangan yang diraih sesungguhnya tidak merupakan jaminan terciptanya stabilitas dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Perubahan sosial dan konflik internal antargolongan masih mewarnai dinamika lokal pada periode-periode pasca revolusi, baik pada masa pra maupun pada masa pasca Pemilihan Umum tahun 1955.

CATATAN

- 1 George D. Larson, Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942. Yogyakarta. Gadjah Mada Univ. Press, Terj. 1990; Andrey R. Kahin. Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan, (Jakarta: Grafiti, 1990); W.H. Frederick Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946), (Jakarta: Gramedia, 1989); Anthony Reid, Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra Terj. (Jakarta: Sinar Harapan, 1987); Ben Anderson. Revolusi Pemuda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Terj. (Jakarta: Sinar Harapan, 1988); Anton E. Lucas. Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi Terj. (Jakarta: Grafiti, 1989); Anthony J.S. Reid, Revolusi Nasional Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 1996).
- 2 Kempen RI, Sunda Ketjil (Sinaraja: 1953), passim; Sarimin Reksodihardjo, Memori Penjerahan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara, 1-4-1952 – 30-3-1957 Jilid I dan II (Singaradja, 30 Maret 1957), I.H. Doko, Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di NTT (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), hal. 109-110; M. Hilir Ismail, Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara (Mataram: Lenge, 2004), hal. 175-176.
- 3 Dokumen No. 53, S.L. van der Wal, Off.Besc.Bet. de NI Betrek, 1945-1950 ('s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1972), hal. 121-124.
- 4 Pendit (1979:80); G. Robinson, The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1995), hal. 186-187; G. Robinson, Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik (Yogyakarta: LKIS, 2006), Bab 7.
- 5 *Bali Membuat Sedjarah baru* tth): hal. 25, 3-7.
- 6 *De Conferentie te Denpasar 7-24 December 1946*, I, Batavia, G. Kolff & Co, tth: 1-2; I Made Sendra, "Konferensi Denpasar dan Pergolakan Politik di Bali, 1946-1950", (Denpasar: Skripsi FS Unud, 1989), hal. 57.
- 7 *De Conferentie te Denpasar, op.cit.*, hal. 14; George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1952), Chap. XII; Anthony J.S. Reid, Revolusi Nasional Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), Bab 6.
- 8 *Bali Membuat Sedjarah...op.cit.*, hal. 9.
- 9 Tjilik, Naskah Sejarah Singkat Perjuangan 1945-1950.
- 10 Wawancara dengan I.G.G. Mudra, I.G.G. Subamia dan I.G.K. Kaler.
- 11 *Pengoemoeman Resmi Gabungan Kerajaan-Kerajaan Bali, 1947-1950*, Denpasar.
- 12 *Peringatan I Tahun DPRD Bali*, (Denpasar), hal. 15.
- 13 Wawancara dengan I.G.G. Subamia, Wayan Dangin, I.G.B. Sugriwa dan I.G.K. Kaler.
- 14 *Peringatan I Tahun DPRD Bali*, hal. 16-17.
- 15 *Peringatan I Tahun DPRD Bali*, hal. 21.
- 16 *Peringatan I Tahun DPRD Bali*, hal. 22.
- 17 UU No. 69 Tahun 1958, LNRI No.122 Tahun 1958.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, Ide A.A. Gde. 1983. *Renville: Terjemahan*, Jakarta: Sinar Harapan.
- . 1985. *Dari NIT ke RIS*, Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press.
- Ben Anderson. 1988. *Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*, Jakarta: Sinar Harapan.
- De Conferentie te Denpasar, 7-24 December 1946*, I. Tth. Batavia: G. Kolff & Co.
- Doko, I.H. 1981. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di NIT*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Drooglever, P.J. & M.J.B. Schonten. 1982-1992. *Officiële Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen, 1945-1950, X-XX, 's-Gravenhage*: Martinus Nijhoff.
- Frederick, W.H. 1989. *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya, 1926-1946)*, Jakarta: Gramedia.
- Hilir Ismail, M. 2004. *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, Mataram: Lenge.
- Kahin, George McTurnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell Univ. Press.
- Kahin, Andrey R. 1990. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Grafiti.
- Kartodirdjo, Sartono. 1981. "Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektifisme Struktural", *Prisma* No. 8, Agustus 1981, Th. X, Jakarta: LP3ES.
- Kempen NIT. Tth. *Bali Membuat Sedjarah Baru 1938-1948*, Makassar: M.V.D.
- Kempen. 1953. *Republik Indonesia Sunda Ketjil*, Singaradja.
- Larson, George D. 1953. *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press.
- Leirissa, R.Z. 2006. *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sejarah.
- Lucas, Anton E. 1989. *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*, Jakarta: Grafiti.
- Nasution, A.H. 1981. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, 4 dan 6, Bandung: Angkasa.

- Pendit, Nyoman S., *Bali Berjuang*, Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- Rai, I Gusti Ngurah, *Revolusi Fisik 1945 di Bali*, Denpasar, UNUD, 1985.
- Reid, Anthony. 1987. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Reid, Anthony J.S. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Reksodihardjo, Sarimin. 1957. *Memori Penjerahan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara, 1-4-1952 - 30-3-1957*, Djidil I, II, Singaradja.
- Rika, Umar. 1995. *Mr. I Gusti Ketut Pudja: Riwayat Hidup dan Pengabdiannya*, Jakarta: Depdikbud, 1995.
- Robinson, G. 1995. *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*, Ithaca: Cornell Univ. Press.
- . 2006. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik di Bali*, Yogyakarta: IKIS.
- Sendra, I Made. 1989. "Konferensi Denpasar dan Pergolakan Politik di Bali, 1946-1950", *Sripsi*, Fak. Sastra, UNUD, Denpasar.
- Setreg RI. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Jakarta: Setreg RI.
- The Liang Gie. 1967. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI*, I, Djakarta: Gunung Agung.
- Tirtoprodjo, S. 1966. *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, Djakarta: Pembangunan.
- Tjilik, Tih. *Naskah Sejarah Singkat Perjuangan 1945-1950*, Denpasar.
- Wal, S.L. van der. 1971-1981. *Officiële Bescheiden Betreffende de Nederlands - Indonesische Betrekkingen, 1945-1950*, I-IX, s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.